

Kebijakan Pemerintahan Pusat di Bidang Politik dalam Pemberitaan Harian Umum Singgalang 2014-2019

Syafwatul Pikri Irvansyah¹, Refni Yulia², Liza Husnita³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Sumatera Barat

e-mail: syafwatulfikri01@gmail.com¹, refniyulia17@gmail.com²,
lizahusnita11@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini tentang Kebijakan Pemerintahan Di Bidang Politik Dan Ekonomi Dalam Pemberitaan Harian Umum Singgalang 2014-2019. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan politik dalam pemberitaan harian umum singgalang pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai yaitu, Untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintahan dibidang ekonomi dan politik di Harian Umum Singgalang masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi menuliskan dalam bentuk tulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah penelitian Sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pada Masa sekarang media massa sudah sangat beragam dan berbagai jumlah sehingga dapat dengan mudah menyebarkan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi yang sedang terjadi. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemudahan untuk dapat mengetahui berita politik dan ekonomi terbaru. Dilihat dari penggunaan media massa sebagai tempat masyarakat untuk memperoleh informasi dalam bidang politik dan ekonomi. Harian umum Singgalang merupakan salah satu surat kabar yang ada di Kota Padang. Harian Umum Singgalang ini memberikan pemberitaan-pemberitaan terkait perpolitikan dan perekonomian yang ada di kota padang maupun di seluruh Indonesia. Dari pemberitaan yang disajikan oleh Singgalang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi bagaimana perpolitikan dan perekonomian yang terjadi di Kota Padang maupun nasional.

Kata kunci: *Kebijakan Pemerintah, Politik dan Ekonomi, Media Massa*

Abstract

This research is about government policies in the political and economic fields in the 2014-2019 Singgalang Public Daily News. The problem of this research is: What are the government policies in the economic and political fields in the news of the Singgalang public daily during the administration of the President of the Republic of Indonesia 2014-2019. The aim of this research to be achieved is, to see how government policies in the economic and political fields were in the Singgalang Public Daily during the administration of the President of the Republic of Indonesia 2014-2019. The research method used is the historical research method which consists of four steps, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography written in the form of scientific writing in accordance with the rules of historical research. The research results show that: Nowadays, mass media are very diverse and numerous so they can easily disseminate information about political and economic events that are currently occurring. In this way, it is easy for people to find out the latest political and economic news. Judging from the use of mass media as a place for people to obtain information in the political and economic fields. The general daily Singgalang is one of the newspapers in Padang City. The Singgalang General Daily provides news related to politics and the economy in the city of Padang and throughout Indonesia. From the news presented

by Singgalang, it can help the public to find out information about politics and the economy that are happening in the city of Padang and nationally.

Keywords: *Government Policy, Politics and Economics, Mass Media*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau umumnya dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini tertulis dengan jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi” Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1, 1945) Pemerintahan memiliki fungsi untuk menjadi hal yang penting dalam mengkaji peran pemerintah. Hal ini disebabkan peranan itu sendiri dapat dinilai dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa peranan itu sendiri lebih bertumpu pada adanya ekspektasi (harapan) dari masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah. Filosofis dibentuknya suatu pemerintahan adalah dalam rangka agar terciptanya keamanan, masyarakat mudah untuk beraktivitas. (Thahir, 2019)

Media massa mulai berkembang dengan seiring berjalannya waktu, di Sumatera Barat sendiri ada beberapa media surat kabar yang masih beroperasi hingga saat ini salah satunya Harian Singgalang. Harian Singgalang berdiri sejak 18 Desember 1968, nama Singgalang sendiri diambil dari salah satu nama gunung yang terkenal di Sumatera Barat, Harian Umum Singgalang beralamat di Jl. Veteran 17 Padang, yang didirikan oleh H. Basril Djabar dan kawan-kawan. Ia adalah seorang jurnalis dan sekaligus sebagai pengusaha. Adapun hal yang mendasari lahirnya Singgalang adalah masyarakat membutuhkan media yang bisa ikut memberi kontribusi melanjutkan pembangunan diberbagai bidang kehidupan di Sumatera Barat(Rahma, 2020). Selain merupakan salah satu kota dengan beberapa media cetak besar, kota padang merupakan kota peninggalan dari masa kolonial belanda(Yulia et al., 2017)

Adanya perkembangan media untuk menyalurkan pemberitaan maka masyarakat yang jauh dari ibu kota dapat mengetahui informasi tentang permasalahan yang terjadi di pemerintahan pusat, hal ini membuat harian umum singgalang menjadi salah satu penyalur informasi bagi masyarakat yang berada dikota padang dan wilayah Sumatera Barat. Mulai dari masa Pemerintahan Presiden Soekarno hingga Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari awal harian umum singgalang didirikan hingga tahun 2019 akhir pertama pemerintahan presiden Joko Widodo. dalam pemberitaan harian singgalang diketahui bahwa ada 7 berita mengenai politik dari tahun 2014-2015 yang diberitakan oleh Harian Umum Singgalang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Proses heuristik bersumber dari beberapa artikel atau dokumen, seperti arsip, koran, buku, penelitian lain dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mengkritisi sumber yang peneliti dapatkan dan mencampurnya dengan benar. (Gottschalk, 2006). Historiografi yaitu penulisan sejarah dalam bentuk karya ilmiah setelah didapati data dan fakta yang akurat dan valid barulah ditulis dalam bentuk skripsi (Gifani et al., 2022).

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan. Tahap awal dilakukan pengidentifikasian masalah penelitian, kemudian dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, maupun penelitian yang relevan dengan objek kajian. Selain itu, penelusuran kepustakaan juga dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep, teori-teori dan informasi dengan sebanyak-banyaknya. Tahap berikutnya adalah melakukan penelitian di lapangan (Yulia & Ersi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan terkait Kebijakan Politik (2014-2019)

Kebijakan politik pemerintahan pusat yang dikeluarkan oleh harian umum singgalang pada tahun 2014-2015 terdapat 7 pemberitaan yang dikeluarkan oleh Harian umum singgalang, berdasarkan temuan tersebut peneliti membuat tabel terkait pemberitaan yang dikeluarkan oleh harian umum singgalang mengenai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 1 Pemberitaan harian umum singgalang terkait kebijakan politik tahun 2014-2015

No	Judul Koran	Tahun/ tanggal
1	Jokowi akan umumkan kabinet secepatnya	21 Oktober 2014
2	Kabinet tersandung laporan KPK	22 Oktober 2014
3	Presidren larang menteri ke DPR	24 November 2014
4	Presiden bubarkan 10 lembaga nonstruktual	13 Desember 2014
5	Joko Widodo dinilai buat skandal politik	10 Januari 2015
6	Presiden Didesak keluaran PERPPU	3 Februari 2015
7	Publik ingin Jokowi jaga jarak dengan PDI-P	10 Mei 2015

Sumber: Harian umum Singgalang

Berdasarkan tabel diatas, Harian Umum Singgalang mengeluarkan 7 pemberitaan terkait kebijakan politik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memberikan dampak menyeluruh kepada seluruh wilayah Indonesia. Pemberitaan yang dikeluarkan oleh singgalang yang pertama pada 20 Oktober 2014 terkait kebijakan pemerintah yaitu "Jokowi akan Umumkan Kabinet secepatnya setelah pelantikan, yang ditunggu dari presiden Joko Widodo adalah pengumumam kabinetnya. Lalu kapan Jokowi akan merilisnya". Pemerintahan Joko Widodo akan segera mengumumkan kabinet yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Penyusunan kabinet ini sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan mengikuti peraturan yang ada sehingga kabinet ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemilihan anggota didalam kabinet Presiden Joko Widodo sudah dipilih dengan seksama yang bertujuan agar terlaksananya pemerintahan dengan baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Harian umum Singgalang,

Pemberitaan selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2014 mengenai "pengumuman kabinet tersandung laporan KPK" Presiden Joko Widodo belum mengumumkan menteri karena dari sejumlah nama yang sudah disusun ternyata masuk radar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Berdasarkan hal tersebut pengumuman yang seharusnya sudah dilaksanakan dalam waktu yang dekat namun diundur karena ada beberapa nama masuk kedalam radar komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Tersandungnya nama-nama calon kabinet yang telah dibuat sebelumnya, membuat presiden Joko Widodo harus mengubah susunan kabinet yang telah ia buat, presiden Joko Widodo memanggil nama-nama calon anggota baru. Berdasarkan hal tersebut seharusnya pemilihan kabinet itu dilakukan dengan seksama karena jika tidak dilakukan dengan ketat maka akan ada terjadi kasus-kasus yang membuat skandal korupsi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, pengumuman kabinet di tunda untuk sementara. Namun, kabinet dipasti kan dibentuk dalam waktu dekat Menurut Kalla, pihaknya masih mematangkan postur kabinet beserta pertimbangan hasil penelusuran KPK tentang rekam jejak para calon menteri"Masih dicek rekam jejak para calon Menteri.

Pemberitaan selanjutnya Pada tanggal 24 November 2014 Harian Umum Singgalang memberitakan mengenai Pemberitaan "Presiden larang Menteri ke DPR", Joko Widodo mengintruksikan agar para menteri dan pejabat tidak menghadiri rapat di DPR hingga

lembaga wakil rakyat itu solid. “Melalui surat Presiden kepada para kabinet dengan nomor SE-12/Seskab/XI/2014 menindak lanjuti arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 November 2014. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Sekretarian Kabinet partai pendukung Jokowi pun setuju dengan pelarangan tersebut” berdasarkan kutipan tersebut bahwa pelarangan yang dilakukan oleh Presiden bertujuan agar lembaga wakil rakyat itu menjadi solid dan mendorong kebersamaan antara anggota wakil rakyat, setelah mereka solid dan menyelesaikan UU MD3 maka wakil rakyat dapat kembali rapat di gedung DPR. Berdasarkan analisis tersebut presiden ingin setiap anggota wakil rakyat itu harus solid dan bekerja sama dalam membuat aturan dan kompak dalam pelaksanaannya

Pemberitaan yang dikeluarkan oleh Harian Umum Singgalang pada 13 Desember 2014 yaitu “Presiden bubarkan 10 lembaga nonstruktural Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktural guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan Negara. Berdasarkan hal tersebut pembubaran 10 lembaga nonstruktural itu bertujuan untuk mengurangi biaya dan keefektifan dari keanggotan. Pembubaran yang dilakukan oleh Presiden itu bertujuan untuk menempatkan tugas sesuai dengan fungsinya. Dengan pembubaran yang dilakukan Presiden berharap kinerja setiap anggotanya menjadi semakin baik dan membuat kemajuan di Indonesia, Pembubaran 10 lembaga tersebut yaitu Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembagunan Perumahan Dan Pemukiman Nasional.

Pada tanggal 10 Januari 2015, Harian Umum Singgalang mengeluarkan pemberitaan yaitu "Joko Widodo Dinilai buat skandal politik karena Presiden Joko Widodo secara mendadak menaikkan kepala lembaga pendidikan kepolisian komisaris jenderal Budi Gunawan Sebagai calon tunggal kepolisian RI". Berdasarkan kutipan tersebut keputusan presiden untuk menaikkan nama jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal menuai kritik dari koalisi Masyarakat sipil sebab jabatan Sutarman baru akan habis pada bulan Oktober. Berdasarkan hal tersebut keputusan peresiden terlalu terburu-buru dalam memutuskan nama yang akan mengisi sebagai kepala Lembaga Pendidikan kepolisian sebab masa jabatan kepala lembaga kepolisian yang masih menjabat saat itu masih ada hingga bulan Oktober. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Lemabaga Pendidikan Kepolisian Jendral Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepolisian Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 Februari 2015, Harian Umum Singgalang mengeluarkan pemberitaan mengenai “Presiden didesak keluaran PERPPU, KPK sedang terguncang ketika empat orang pimpinannya dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas berbagai kasus” berdasarkan kutipan tersebut anggota DPR yaitu Benny K Harman sebagai wakil ketua Komisi III DPR meminta agar presiden segera mengambil tindakan agar didalam KPK tidak terdapat adanya anggota yang bermasalah, dan juga agar memudahkan DPR untuk menyeleksi pemimpin KPK. Berdasarkan analisis tersebut maka DPR yaitu wakil Ketua Komisi III meminta agar Presiden segera mengeluarkan perppu agar tidak ada kejadian yang sama lagi didalam KPK.

Pemberitaan tahun 2015 cetakan Harian Umum Singgalang memberitakan Joko Widodo pada tanggal 10 Mei 2015 mengenai "publik ingin Jokowi jaga jarak dengan PDI-P Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak terlalu dekat berhubungan dengan PDI perjuangan meskipun PDI merupakan partai pegusungnya." Berdasarkan kutipan tersebut rakyat meminta agar presiden lebih indenpenden dan lepas dari pengaruh PDI-P karena masyarakat menilai bahwa Presiden tidak mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Negara. Berdasarkan hal tersebut maka rakyat meminta agar presiden tidak terlalu dekat dengan PDI-P karena dalam urusan melaksanakan urusan Negara Presiden harus lebih indenpenden dan juga harus memikirkan negaranya bukan mengikuti partai yang telah mengusungnya. Setelah itu pada bulan Mei ada pemberitaan mengenai "Demo mahasiswa

baru pemanasan, demo mahasiswa bertepatan dengan hari Kebangkitan nasional,berlangsung ricuh di sejumlah wilayah Di Indonesia." Berdasarkan kutipan tersebut bahwa mahasiswa melakukan demo agar pemerintah memperbaiki atau mencabut aturan-aturan yang dinilai tidak pro kepada rakyat. Mereka menuntut agar pemerintah segera menstabilkan harga ekonomi yang terpuruk, mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat supaya pemerintah segera memperbaiki aturan yang ada supaya bisa mensejahterakan rakyatnya.

SIMPULAN

Pers atau media massa merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pers atau media massa mempunyai dua sisi kedudukan, pertama yaitu merupakan media komunikasi yang tertua di dunia, dan yang kedua pers sebagai lembaga masyarakat dan sistem politik. Pada Masa sekarang media massa sudah sangat beragam dan berbagai jumlah sehingga dapat dengan mudah menyebarkan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik yang sedang terjadi. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemudahan untuk dapat mengetahui berita politik terbaru. Dilihat dari penggunaan media massa sebagai tempat masyarakat untuk memperoleh informasi dalam bidang politik, media massa banyak memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harian umum Singgalang merupakan salah satu surat kabar yang ada di Kota Padang, Harian Umum Singgalang ini memberikan pemberitaan-pemberitaan terkait perpolitikan yang ada di kota padang maupun di seluruh Indonesia. Dari pemberitaan yang disajikan oleh Singgalang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi bagaimana perpolitikan dan perekonomian yang terjadi di Kota Padang maupun nasional.

Pada pemberitaan yang dikeluarkan oleh harian umum singgalang mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pemberitaan kebijakan Politik pada tahun 2014-2015 pemerintah melakukan berbagai macam tindakan terkait kabinet yang akan menemaninya didalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun kedepan, namun tidak sedikit masalah yang terjadi didalam pembentukan kabinet yang akan menemani Presiden untuk menjalankannya, oleh sebab itu pemerintah tidak henti untuk merombak kabinetnya supaya menjadi lebih baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Perombakan ini tidak semena-mena terjadi karena keinginan Presiden semata, melaikan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya supaya kehidupan masyarakat menjadi lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harian Umum Singgalang "Jokowi Akan Umumkan Kabinet Secepatnya"20 Oktober 2014
Harian Umum Singgalang " Pengumuman Kabinet Tersandung Laporan KPK" 22 Oktober 2014
Harian Umum Singgalang "Presiden Larang Menteri Ke DPR' 24 November 2014
Harian Umum Singgalang "Presiden Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural" 13 Desember 2014
Harian Umum Singgalang "Joko Widodo Dinilai Buat Skandal Politik" 10 Januari 2015
Harian Umum Singgalang "Presiden Didesak Keluarkan PERPPU" 3 Februari 2015
Harian Umum Singgalang "Publik Ingin Jokowi Jaga Jarak Dengan PDI-P" 10 Mei 2015
Gifani, C. M., Ersi, L., & Junaidi, J. K. (2022). Padang Pada Masa Reformasi 1998: Analisis Wacana Pada Harian Umum Singgalang. *Putri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(2), 275–281.
Gottschalk, L. (2006). *Mengerti Sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
Rahma, yuni putri dkk. (2020). *Pers Sumatera Barat Pasca Orde baru: Perkembangan Harian Umum Singgalang 1999-2010*.
Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1, 105 129 (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. In

- Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. [http://eprints.ipdn.ac.id/5979/1/Buku Pemerintahan dan Pemerintahan Indonesia sebuah Bunga Rampai.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5979/1/Buku_Pemerintah_dan_Pemerintahan_Indonesia_sebuah_Bunga_Rampai.pdf)
- Yulia, R., Erawati, M., Asnan, G., & Nopriyasman. (2017). Revitalisasi Kawasan Kota Tua Padang Sebagai Salah Satu Alternatif Wisata Sejarah di Kota Padang. *Bakaba*, 6(2), 17–23.
- Yulia, R., & Ersi, L. (2022). Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan Dan Pendidikan*, 9, 32–43.